

2.1.2. Batas Wilayah

Kabupaten Indramayu secara *de facto*, memiliki batas-batas wilayah baik langsung maupun tidak langsung dengan beberapa wilayah daerah lainnya. Batas-batas wilayah Kabupaten Indramayu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Cirebon.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Subang.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa dan Kabupaten Cirebon.

2.1.3. Luas Wilayah

Berdasarkan *indramayukab.go.id*, cakupan wilayah administrasi Kabupaten Indramayu melintang sepanjang pantai utara yang terhimpit oleh Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Subang dengan total wilayah sebesar 2.040.110 kilometer. Dengan lahan sebesar itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indramayu pada tahun 2022 mencatat bahwa lahan yang dipergunakan untuk lahan pertanian sawah sebesar 116.718 ha, lahan pertanian bukan sawah sebesar 57.189 ha, lahan bukan pertanian sebesar 36.020.

2.1.4. Kependudukan Kabupaten Indramayu

Berdasarkan data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indramayu, sepanjang tahun 2019 hingga 2021 tercatat penurunan kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, penduduk Kabupaten Indramayu sebesar 1.861.269 jiwa. Sementara di tahun 2020 berjumlah 1.834.434. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan populasi sebesar 26.835 jiwa atau 1,44%. Kondisi pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 1.851.383 jiwa. Sehingga, jika dikalkulasikan dengan tahun sebelumnya naik sebesar 16.949

atau 0,9%. Sebagai gambaran rinci terkait jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Indramayu pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Per Kecamatan pada Tahun 2021

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan
Haurgeulis	46.668	45.501
Gantar	30.962	30.261
Kroya	33.656	32.893
Gabuswetan	29.327	29.392
Cikedung	20.489	20.762
Terisi	28.902	28.212
Lelea	24.300	24.530
Bangodua	15.365	15.127
Tukdana	28.781	28.893
Widasari	19.199	18.906
Kertasemaya	31.929	31.518
Sukagumiwang	18.214	18.248
Krangkeng	34.557	34.031
Karangampel	35.301	34.859
Kedokanbunder	24.939	24.643
Juntinyuat	44.759	44.778
Sliyeg	32.199	32.210
Jatibarang	38.749	38.564
Balongan	23.386	23.629
Indramayu	60.564	60.302
Sindang	28.646	27.970
Cantigi	16.058	15.656
Pasekan	14.625	13.884
Lohbener	29.335	28.739
Arahan	18.345	17.927

Losarang	27.738	27.127
Kandanghaur	48.100	46.449
Bongas	25.504	25.581
Anjatan	44.284	44.678
Sukra	24.747	24.802
Patrol	30.650	30.473
Kabupaten Indramayu	930.838	920.545

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, 2021*

Berdasarkan dari tabel jumlah penduduk diatas, jumlah penduduk paling banyak di Kabupaten Indramayu ditempati oleh Kecamatan Indramayu dengan penduduk laki-laki berjumlah 60.564 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 60.302 jiwa.

2.1.5. Sosial Politik Kabupaten Indramayu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sosial merupakan segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat. Sementara itu, politik dimaknai sebagai pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan. Oleh karenanya, dalam sosial politik yang tercakup dalam subbagian ini adalah menyakut kehidupan agama dan kondisi politik yang ada di Kabupaten Indramayu ditinjau dari eksistensi partai-partai yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu. Berikut ini tabel penduduk menurut sebaran agama di tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Indramayu.

Tabel 2. 2 Penduduk Menurut Agama dan Kecamatan pada Tahun 2022

Kecamatan	Islam	Prote stan	Katolik	Hind u	Budha	Konghuc u
Haurgeulis	93.226	685	61	0	19	2
Gantar	62.503	33	4	4	1	0
Kroya	68.019	317	11	0	10	0
Gabuswetan	59.727	82	5	0	8	0
Cikedung	42.531	17	2	6	1	0
Terisi	58.572	41	40	0	18	3
Lelea	50.120	36	55	0	11	0
Bangodua	31.633	8	2	0	1	0
Tukdana	59.128	18	1	0	6	0
Widasari	39.319	38	18	3	2	0
Kertasemaya	65.189	54	3	0	2	0
Sukagumiwang	37.520	5	0	0	4	0
Krangkeng	70.657	62	16	0	0	0
Karangampel	71.236	40	15	0	12	0
Kedokanbunder	50.817	10	0	0	0	0
Juntinyuat	91.206	40	3	0	0	0
Sliyeg	65.583	36	4	0	2	4
Jatibarang	77.319	829	349	6	103	0
Balongan	47.800	14	0	4	1	0
Indramayu	120.977	862	340	27	38	2
Sindang	58.066	23	13	5	1	0
Cantigi	32.120	1	1	0	0	0
Pasekan	29.092	2	40	0	0	0
Lohbener	59.015	48	14	1	21	6
Arahan	36.929	2	1	0	0	0
Losarang	56.387	190	71	6	22	0
Kandanghaur	95.179	371	104	1	17	0

Bongas	52.158	30	13	0	1	0
Anjatan	90.630	198	32	3	8	0
Sukra	48.968	71	10	0	2	0
Patrol	61.232	138	29	1	28	8

Sumber: *indramayukab.go.id*

Ditinjau dari tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Kabupaten Indramayu memeluk Agama Islam dengan Kecamatan Indramayu menjadi kecamatan dengan jumlah pemeluk Islam terbanyak.

Selanjutnya, jika ditilik dari realitas politik yang hadir di Kabupaten Indramayu per tahun 2023 ini. Maka dapat dilihat secara seksama bahwa kursi parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu didominasi oleh kader Partai Golongan Karya dengan 22 kursi. Menurut data yang terdapat di *dprd-indramayukab.go.id*, hasil pemilihan umum legislatif pada tahun 2019 di Kabupaten Indramayu sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Fraksi-Fraksi Partai DPRD Kabupaten Indramayu Periode 2019 - 2024

Fraksi Partai Golongan Karya (GOLKAR)	
1. Syaefudin, SH	12. Dra. Hj. Nurhayati, M.Pd.i.
2. Drs. Eddy Mulyadi, MM	13. Warli, S.E.
3. Drs. H. Muhaemin, M.Si	14. Tarwidi
4. Wardah	15. Hj. Ina Sofatual Marwah, A.Md.
5. Fenty Ruchyanti	16. Hj. Siti Aminah
6. Hj. Rini Yuliani, A.Md.	17. Uun Roenah, S.Pd.
7. Eka Trilinda Ningrum	18. Drs. H. Hatyono, M.Si.
8. Siti Juanah, S.Pd.	19. Abdul Rojak

9. Ibnu Risman Syah	20. M. Alam Sukmajaya, S.T. M.M.
10. Hj. Kursiah	21. Tuti Alawiyah, SH.
11. Hj. Cuengsih	22. Karmadi
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P)	
1. Tarmudi Atmadja	6. Estim Enting
2. H. Sirojudim, S.P., M.Si.	7. Abdul Rohman, SE., MM.
3. Suhendri, SH.	
4. Anggi Nofiah, S.I.Pol.	
5. Liyana Listia Dewi, SE., M. AP	
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	
1. Amroni, S.I.P.	5. H. Imam Mul Mutaqim
2. Imron Rosadi, S.Pd.I	
3. Dalam, SH., KN.	
4. Akhmad Mujani Nur, SH.I	
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	
1. H. Turah	4. Iffan Sudiawan
2. Iis Naeni, S.IP	5. H. Muhammad Ali Akbar, SP.
3. Kiki Zakiyah, SE	6. Dullah
Fraksi Demokrat Perindo	
1. H. Nico Antonio, S.T.	2. H. Rudin
Fraksi Merah Putih	
1. Ruswa, M.Pd.I	3. H. Ruyanto
2. Bhisma Panji D., S.Si., Apt	
Fraksi Demokrat	
1. Sandi Jaya Pasa	2. Taryadi

Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	
1. H. Ahmad Fatoni	

Sumber: *dprd-indramayukab.go.id*

Berdasarkan data anggota legislatif Kabupaten Indramayu tahun 2019-2024, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) menjadi partai dengan anggota legislatif terbanyak yakni dengan 22 kursi, diikuti oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan 7 kursi, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan 6 kursi, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 6 kursi, Fraksi Merah Putih dengan 3 kursi, Fraksi Demokrat Perindo dengan 2 kursi, Fraksi Demokrat dengan 2 kursi dan terakhir adalah Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan 1 kursi.

2.2. Sejarah Partai Golongan Karya

Sejarah Partai Golongan Karya (Golkar) dimulai dengan berdirinya Sekretariat Bersama (Sekber) Golongan Karya pada tahun 1964, bersamaan dengan masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Sekretariat Bersama Golongan Karya ini didirikan oleh golongan militer, dalam hal ini adalah perwira Angkatan Darat yang diantaranya adalah Letnan Kolonel Suhardiman dari Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) yang didirikan sebelumnya pada tahun 1960 untuk mengimbangi eksistensi Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia yang merupakan organisasi sayap Partai Komunis Indonesia (PKI), melakukan penghimpunan kepada berpuluh-puluh organisasi kepemudaan, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).

Secara *de jure*, Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) didirikan pada tanggal 20 oktober 1964. Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) merupakan wujud antisipasi yang ditujukan untuk memitigasi pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta organisasi massa yang berdiri dan bergerak dibawah naungannya dalam mendikte kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Frot Nasional yang semakin hari, semakin meningkat dan progresif. Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) merupakan wadah dari golongan karya murni yang dianggap berseberangan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan tidak berada dibawah pengaruh politik tertentu secara berkelanjutan. Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono merupakan ketua umum pertama Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) yang dikemudian hari digantikan oleh Mayor Jenderal (Mayjen) Suprpto Sukowati melalui agenda Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I yang dilaksanakan pada bulan desember tahun 1965.

Pada perkembangannya, eksistensi Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) mengalami pertumbuhan anggota yang pesat. Hal ini didorong dengan adanya fakta bahwa masuknya golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) dalam Front Nasional menyadari bahwa ketetapan dan garis perjuangan dari organisasi fungsional Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) adalah ditujukan untuk menegakan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Perkembangan jumlah anggota ini dapat ditinjau dari jumlah awal anggota adalah 61 organisasi dan membesar menjadi 291 organisasi.

Diantara 291 organisasi yang terhimpun sebagai anggota Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) kemudian membaginya menjadi 7 Kelompok Induk Organisasi (KINO). Ketujuh Kelompok Induk Organisasi (KINO) ini sebagai berikut:

1. Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)
2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)
3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
4. Organisasi Profesi
5. Organisasi Massa Pertahanan Keamanan (HANKAM)
6. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)
7. Gerakan Pembangunan untuk menghadapi Pemilu 1971

Ketujuh Kelompok Induk Organisasi (KINO) yang merupakan kekuatan inti dari Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) ini kemudian mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk mengikuti agenda kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) yang direduksi menjadi satu nama dan tanda gambar yang digunakan sebagai identitas kepesertaannya dalam Pemilihan Umum, namanya ini kemudian disebut sebagai Golongan Karya (Golkar). Sejak Pemilihan Umum dilaksanakan pada tahun 1971, nama dan logo tetap dipertahankan hingga saat ini.

Pada Pemilu 1971, Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) mengikuti kontestasi pemilihan umum. Partai-partai besar seperti Nahdlatul Ulama (NU), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) yang merupakan partai dengan kebesaran dan kejayaan di masa lampau sangat optimis dapat menjadi yang keluar sebagai pemenang. Golongan Karya (Golkar) dipandang sebagai golongan yang sama sekali tidak diperhitungkan

mengingat kemampuan politik Golongan Karya (Golkar) ke akar rumput diragukan.

Pada akhirnya, Golongan Karya (Golkar) keluar sebagai pemenang pemilihan umum (Pemilu) dengan perolehan suara sebesar 34.348.673 atau 62,79% dari total perolehan suara. Keluarnya Golongan Karya (Golkar) sebagai pemenang dalam agenda kontestasi merupakan dampak dari kekeliruan yang disadari oleh partai-partai besar bahwa secara *de facto* perpecahan dan kericuhan internal yang terjadi secara kontinu menyebabkan sebagian besar tokoh-tokoh pentingnya berpindah haluan ke Golongan Karya (Golkar).

Setelah Peristiwa Gerakan 30 September, Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) menyatakan dukungannya secara terbuka yang ditujukan kepada Soeharto sepenuhnya sebagai pimpinan militer dalam rangka untuk melancarkan aksi-aksinya untuk melumpuhkan kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang pada akhirnya juga memboncengi dalam upaya pelemahan kekuatan Bung Karno. Di tahap selanjutnya, Golongan Karya (Golkar) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) menjadi tulang punggung utama dalam rezim militer era Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto.

Selanjutnya, eskalasi politik Orde Baru diciptakan dan diimplementasikan oleh pimpinan militer dan Golongan Karya (Golkar). Hal ini dapat dilihat dari adanya jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislative, dan yudikatif digerakan dan diduduki oleh kader-kader Golongan Karya (Golkar) selama puluhan tahun Orde Baru dibawah kendali Presiden Soeharto berkuasa. Keluarga besar Golongan Karya yang diarahkan sebagai jaringan konstituen, dibina sejak

awal Orde Baru melalui suatu pengaturan informal yaitu jalur A untuk lingkungan militer, jalur B untuk lingkungan birokrasi dan jalur G untuk lingkungan sipil di luar birokrasi.

Pemuka ketiga jalur tersebut melakukan fungsi pengendalian terhadap GOLKAR lewat Dewan Pembina yang mempunyai peran strategis. Jadi Pimpinan Pemilu Dalam pemilu GOLKAR yang berlambang beringin ini selalu tampil sebagai pemenang. Kemenangan GOLKAR selalu diukir dalam pemilu di tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Arus reformasi bergulir. Soeharto akhirnya berhasil dilengserkan oleh gerakan mahasiswa. Hal ini kemudian berimbas pada GOLKAR. Karena Soeharto adalah penasehat partai, maka GOLKAR juga dituntut untuk dibubarkan. Saat itu GOLKAR dicerca di mana-mana.

Di bawah kepemimpinan Akbar, Golongan Karya (Golkar) berubah wujud menjadi Partai Golongan Karya (Golkar). Saat itu Golongan Karya (Golkar) juga mengusung citra sebagai Golongan Karya (Golkar) baru. Upaya Akbar tak sia-sia, dia berhasil mempertahankan Golongan Karya (Golkar) dari serangan eksternal dan krisis citra, inilah yang membuat Akbar menjadi ketua umum Golongan Karya (Golkar) yang cukup legendaris. Partai Golongan Karya (Golkar) kemudian ikut dalam Pemilu 1999, berkompetisi bersama partai-partai baru di era multipartai.

Pada pemilu pertama di Era Reformasi ini Partai Golongan Karya (Golkar) mengalami penurunan suara di peringkat ke dua di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun pada pemilu berikutnya Golongan Karya (Golkar) kembali unggul. Pada pemilu legislatif 2004, Partai Golongan Karya

(Golkar) menjadi pemenang pemilu legislatif dengan 24.480.757 suara atau 21,58% suara sah.

Pada pemilu legislatif 2009 lalu suara Partai Golongan Karya (Golkar) kembali turun ke posisi dua. Pemenang pemilu dipegang oleh Partai Demokrat. Dalam Munas VIII di Pekanbaru, Aburizal Bakrie terpilih sebagai ketua umum menggantikan Jusuf Kalla. Sebagai pimpinan baru partai beringin, Aburizal bertekad akan kembali membawa Golongan Karya (Golkar) memenangkan pemilu. Dengan menargetkan Golongan Karya (Golkar) menjadi pemenang pertama pemilu legislatif 2014 nanti. Ketua Umum Golongan Karya (Golkar) dari masa ke masa :

1. Djuhartono (1964-1969)
2. Suprpto Sukowati (1969–1973)
3. Amir Moertono (1973–1983)
4. Sudharmono (1983–1988)
5. Wahono (1988–1993)
6. Harmoko (1993–1998)
7. Akbar Tandjung (1998–2004)
8. Jusuf Kalla (2004–2009)
9. Aburizal Bakrie (2009–2014)
10. Setya Novanto (2014-2019)
11. Airlangga Hartato (2019-Sekarang)

2.2.1. Visi Partai Golongan Karya

Sejalan dengan cita-cita para bapak pendiri negara (*the founding fathers*) kita bahwa tujuan kita bernegara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan ikut menciptakan perdamaian dunia, maka Partai

Golongan Karya (Golkar) sebagai pengemban cita-cita Proklamasi menegaskan visi perjuangannya untuk menyertai perjalanan bangsa mencapai cita-citanya.

Partai Golongan Karya (Golkar) berjuang demi terwujudnya Indonesia baru yang maju, modern, bersatu, damai, adil dan makmur dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berakhlak baik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, cinta tanah air, demokratis, dan adil dalam tatanan masyarakat madani yang mandiri, terbuka, egaliter, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja dan semangat kekaryaannya, serta disiplin yang tinggi.

Dengan visi ini maka Partai Golongan Karya (Golkar) hendak mewujudkan kehidupan politik nasional yang demokratis melalui pelaksanaan agenda-agenda reformasi politik yang diarahkan untuk melakukan serangkaian koreksi terencana, melembaga dan berkesinambungan terhadap seluruh bidang kehidupan. Reformasi pada sejatinya adalah upaya untuk menata kembali sistem kenegaraan kita di semua bidang agar kita dapat bangkit kembali dalam suasana yang lebih terbuka dan demokratis. Bagi Partai Golongan Karya (Golkar) upaya mewujudkan kehidupan politik yang demokratis yang bertumpu pada kedaulatan rakyat adalah cita-cita sejak kelahirannya.

2.2.2. Misi Partai Golongan Karya

Dalam rangka mengaktualisasikan doktrin dan mewujudkan visi tersebut Partai Golongan Karya (Golkar) dengan ini menegaskan misi perjuangannya, yakni: menegakkan, mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara dan ideologi bangsa demi untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik

Indonesia; dan mewujudkan cita-cita Proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, menegakkan supremasi hukum, mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan hak-hak asasi manusia.

Dalam rangka membawa misi mulia tersebut Partai Golongan Karya (Golkar) melaksanakan fungsi-fungsi sebagai sebuah partai politik modern, yaitu: Pertama, mempertegas komitmen untuk menyerap, memadukan, mengartikulasikan, dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat publik.

Kedua, melakukan rekrutmen kader-kader yang berkualitas melalui sistem prestasi (merit system) untuk dapat dipilih oleh rakyat menduduki posisi- posisi politik atau jabatan-jabatan publik. Dengan posisi atau jabatan politik ini maka para kader dapat mengontrol atau mempengaruhi jalannya pemerintahan untuk diabdikan sepenuhnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

2.2.3. Tujuan, Fungsi dan Tugas Partai Golongan Karya

Partai Golongan Karya (Golkar) bertujuan :

- a. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan UUD 1945;
- b. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945;
- c. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, hukum, dan Hak Asasi Manusia.

Partai Golongan Karya (Golkar) menyelenggarakan fungsi:

- a. Menghimpun persamaan sikap politik dan kehendak untuk mencapai cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- b. Mempertahankan, mengemban, mengamalkan, dan membela Pancasila serta berorientasi pada program pembangunan di segala bidang tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
- c. Menyerap, menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat, serta meningkatkan kesadaran politik rakyat dan menyiapkan kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi, dengan memperhatikan integritas, jejak rekam dan kesetaraan.

2.3. Partai Golongan Karya Kabupaten Indramayu

Eksistensi Partai Golongan Karya (Golkar) di Indramayu memiliki perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan keluarnya H. Irianto MS Syafiudin sebagai pemenang kontestasi Pemilihan Bupati Kabupaten Indramayu periode 2000-2005 dengan H. Dedi Wahidi, S. Pd sebagai wakilnya. Naiknya H. Irianto MS Syafiudin sebagai Bupati Kabupaten Indramayu secara langsung mengubah arah politik di Kabupaten Indramayu, melalui kemahiran kemampuan

komunikasi politik dan kepemimpinannya, mengantarkan H. Irianto MS Syafiudin sebagai pemimpin tak tersentuh hingga periode keduanya berakhir pada tahun 2010.

Sebagai upaya untuk memupuk kesinambungan arah gerak dan penyemaian jaringan yang telah dibentuk sebelumnya, Hj. Anna Sophanah kemudian dipanggil oleh Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Indramayu untuk menjadi calon Bupati Kabupaten Indramayu periode 2010-2015 dan dikemudian hari berlanjut di kontestasi 2015-2020 sebagai petahana dengan Drs. H. Supendi, M.Si sebagai wakilnya. Meskipun tidak secara tuntas menjalani kewajibannya sebagai pemimpin yakni dengan adanya surat pengunduran diri pada tahun 2018 yang secara langsung menarik kepemimpinannya sebagai puncak hirarkis pimpinan di Kabupaten Indramayu, Hj. Anna Sophanah dianggap sebagai kader yang mampu mengkondisikan jaringan massa baik di akar rumput maupun di jajaran elit partai dan pejabat di tingkat regional maupun nasional.

2.4. Gambaran Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Indramayu

2.4.1. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Masa Terpilihnya Irianto MS Syafiuddin

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berlangsung pada masa transisi reformasi merupakan pemilihan yang menggunakan mekanisme pemilihan tidak langsung karena diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kabupaten Indramayu merupakan satu dari sekian banyak daerah lainnya yang melangsungkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pada tahun 1999, Partai

Demokrasi Perjuangan (PDIP) berhasil menjadi partai yang menguasai hampir setengah kursi yang ada di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu (Long, T. K., *dkk*.2023).. Hal ini yang mengantarkannya menjadi partai yang dapat mencalonkan sendiri kadernya untuk maju dalam konstelasi Pemilihan Bupati Kabupaten Indramayu pada tahun 2000. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa dengan jumlah kursi yang dimiliki oleh Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) Kabupaten Indramayu lebih dari cukup untuk menghantarkan salah satu kadernya menjadi Bupati Kabupaten Indramayu. Namun, arah politik yang ditiupkan ternyata mampu dibelokan oleh kader muda, kader Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Indramayu yang mapan melakukan lobbying kepada setiap anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu guna memilih dirinya menjadi Bupati Kabupaten Indramayu. Belakangan diketahui bahwa Irianto Mahfudz Sidik Syafiuddin merupakan kader Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Indramayu yang telah memulai langkah politik sejak muda melalui keanggotaannya pada beberapa organisasi masyarakat seperti Pemuda Pancasila dan Forum Komunikasi Daerah Penghasil Minyak. Melalui kedua organisasi ini, Irianto Mahfudz Sidik Syafiuddin atau Yance menjadi tokoh yang dikenal luas dalam memberikan sumbangsih baik secara sosial maupun ekonomi. Pada akhirnya ini yang menjadi modalitasnya dalam mempengaruhi pemilih Kabupaten Indramayu tahun 2004 pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung digulirkan.

Berkaitan dengan organisasi yang diikuti dan dijalani sewaktu muda, Yance berhasil membentuk jaringan yang loyal dan mampu membantu keberjalan organisasi hingga masa kepemimpinan Yance berakhir berangsur-angsur dengan keniatannya yang besar dalam dunia politik. Secara khusus, Yance menggunakan strategi “tebar ikan” yang ditebarkan pada setiap partai politik yang sedang naik daun dalam konstelasi politik di Kabupaten Indramayu. Hal ini dilakukan guna memaksimalkan potensinya menjadi Bupati Kabupaten Indramayu di masa yang akan datang. Dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) ulang yang melibatkan setiap unsur-unsur daerah pemilihan dan substansial yang dipilih, Yance berhasil membantu secara halus kader-kader terbaik organisasinya yang kebanyakan berasal dari Pemuda Pancasila guna mengisi pos-pos Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu. Dominasi besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ternyata diisi oleh sebagian besar kader yang loyal dengan Yance. Sehingga berdasarkan hasil musyawarah mufakat yang melibatkan antar Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu, Yance dan Dedi Wahidi keluar sebagai pemenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Indramayu yang dilaksanakan tidak langsung melalui perwakilan-perwakilan masyarakat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu.

Dedi Wahidi dipilih sebagai pendamping Yance pada masa pencalonannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu tahun 2000, dilatarbelakangi oleh kesepahaman dan kecerdikan Yance dalam melihat kemungkinan-kemungkinan di depan mata, utamanya karena kuantitas Anggota

Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu yang dimiliki oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Indramayu yang pada saat itu menyentuh 6 kursi. Jika digabung secara keseluruhan dengan Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Indramayu adalah 16 kursi. Kondisi ini tentu masih memiliki jalan terjal, mengingat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kala itu telah menyentuh angka 17 kursi. Oleh karenanya dibutuhkan sekitar 9 kursi lagi guna memuluskan jalan pasangan Irianto Mahfudz Sidik Syafiuddin – Dedi Wahidi guna memenangi kontestasi. Melalui lobbying yang melibatkan stakeholder partai politik dan individu, pasangan Irianto Mahfudz Sidik Syafiuddin – Dedi Wahidi berhasil mendapatkan suara 25 kursi pada akhir masa sidang yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu.

Pada masa keterpilihannya pada tahun 2004, Yance menggandeng Heri Sudjati yang sebelumnya merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) yang membantunya dalam melaksanakan kebutuhan-kebutuhan administratif pemerintahan. Sebagai kepala birokrasi, Heri Sudjati dipandang sebagai individu yang mapan secara jaringan dan mampu menggerakkan mesin birokrasi dalam rangka memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Indramayu pada tahun 2004. Seperti yang kita pahami, doktrinasi dan arah gerak Partai Golongan Karya di masa Orde Baru adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), Birokrasi dan Golongan Karya itu sendiri. Oleh karenanya, penghapusan dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada masa transisi reformasi menjadikan doktrinasi dan arah gerak Partai Golongan

Karya berfokus pada menggerakkan sumber daya birokrasi dan Partai Golongan Karya. Pada tahun 2004, Yance dimandatkan sebagai Ketua DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Indramayu. Kondisi ini semakin memantapkan posisinya sebagai kekuatan utama di Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Indramayu sekaligus Indramayu secara umum.

Umumnya, kader partai politik yang hendak mencalonkan diri sebagai calon Bupati diharuskan melalui tahapan penjangkaran dan pemantapan kapabilitas di internal partai politik. Salah satu yang menjadi tolak ukur individu dipilih oleh partai politik guna maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah rekomendasi partai politik (Primadi, A., & Purwaningsih, T. 2019). Rekomendasi partai politik ini biasanya didapatkan melalui survey partai terhadap individu yang mengajukan diri sebagai calon kontestasi kepala daerah. Berkaitan dengan Yance, Yance menjadi tokoh yang berhasil menjadi calon dengan survey tertinggi dalam survei yang telah disebar dan dipublikasikan oleh Partai Golongan Karya (Golkar). Hal inilah yang menjadikannya sebagai calon Bupati Kabupaten Indramayu yang berasal dari Partai Golongan Karya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Indramayu tahun 2004.

Berpasangan dengan Heri Sudjati, mengantarkan Yance dan Partai Golongan Karya menang besar dengan perolehan suara mencapai lebih dari 300 ribu suara sehingga memuluskannya menjadi Bupati Kabupaten terpilih untuk periode kedua (Najaha, S. 2021).

2.4.2. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) pada masa Terpilihnya

Anna Sophanah

Pada masa naiknya Hj. Anna Sophanah menjadi puncak pimpinan tertinggi dalam pemerintahan Kabupaten Indramayu, diwarnai dengan intrik politik yang mengkhawatirkan dalam tubuh internal Partai Golongan Karya (Golkar). Hal ini ditimbulkan akibat adanya kekhawatiran dari internal Partai Golongan Karya (Golkar) bahwa dengan naiknya Hj. Anna Sophanah menjadi calon Bupati Kabupaten Indramayu untuk menggantikan Irianto Mahfudz Sidik Syafiuddin yang akan habis masa jabatannya pada tahun 2010. Namun atas desakan berbagai pihak, Hj. Anna Sophanah tetap mengikuti prosedur pencalonan Bupati Kabupaten Indramayu (Khaerunsiah, *dkk*, 2018). Majunya Hj. Anna Sophanah menjadikannya sebagai calon Bupati Kabupaten Indramayu yang dianggap prospektif dalam mengatasi permasalahan mengenai isu keperempuanan di Kabupaten Indramayu yang pada saat itu tengah banyak dihantam beberapa isu yang kurang mengenakan seperti Rangda Cilik Turunan Indramayu (RCTI) dan maraknya wanita Indramayu yang bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) di beberapa daerah hingga kota besar Indonesia seperti Jakarta dan Bandung.

Pada pemilihannya yang pertama pada tahun 2010, Hj. Anna Sophanah berhasil mendapatkan rekomendasi dari Partai Golongan Karya Pusat. Oleh karenanya Hj. Anna Sophanah kemudian bersiap diri mencalonkan diri menjadi Bupati Kabupaten Indramayu pada tahun 2010 dengan menjadikan H. Supendi yang pada saat itu telah menjabat sebagai Sekretaris Daerah pada masa kepemimpinan Yance. Situasi yang sama ketika Yance menjajaki Heri Sudjati

sebagai Wakilnya pada tahun 2004. Dengan bermodalkan pada mesin partai yang berimbang, pasangan Hj. Anna Sophanah - H. Supendi berhasil memenangkan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Indramayu dengan memperoleh suara sebesar 511.359 dengan persentase 60,78% dari jumlah suara yang masuk secara keseluruhan (Kompas.com, 2010).

Pada periode kedua yakni pada tahun 2015, Hj. Anna Sophanah kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Indramayu dengan menggandeng calon Wakil Bupati yang sama yakni H. Supendi, Hj. Anna Sophanah melakukan konsolidasi kemenangan dengan menggaet berbagai komponen, utamanya birokrasi dan partai politik lainnya yang memiliki kepentingan yang sama guna memuluskan jalan menuju Indramayu yang lebih baik. Melalui kandidasi yang meleburkan Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Indramayu dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. Melalui koalisi gemuk ini, pasangan Hj. Anna Sophanah - H. Supendi kembali menemukan momentum untuk kembali terpilih untuk kedua kalinya pada periode tahun 2015-2020 dengan perolehan suara mencapai 452.032 atau 55.93% dari seluruh suara yang masuk (KPU Indramayu, 2015).